

Analisis penerapan klausula penyesuaian ujarah pada akad Ijarah muntahiyya bit tamlik: studi kasus pada Bank XYZ Syari'ah = Analysis of implementation ujarah adjustment clause in ijarah muntahiyya bit tamlik agreement: case study XYZ Sharia Bank

Fauzan Febrian, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20456159&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Kepatuhan syari'ah syari'ah compliance dalam pelaksanaan sistem perbankan syari'ah di Indonesia masih cenderung tidak dipedulikan, khususnya dalam penerapan akad IMBT. Dalam akad tersebut terdapat biaya ujarah sewa yang harus dibayar oleh nasabah dalam suatu periode tertentu yang jumlahnya telah disepakati bersama. Namun, apabila bank ingin mengubah harga ujarah, maka bank harus memuat klausula penyesuaian ujarah dalam akad IMBT dan diketahui oleh nasabah. Hal inilah yang sering menjadi masalah dalam praktek. Pemberitahuan mengenai pembayaran ujarah sering dianggap sepele oleh bank kepada nasabah. Bahkan tidak jarang bank yang memberitahukan pembayaran ujarah atas kemauan sepihak, sehingga tidak ada yang namanya ijab qabul antar para pihak. Atas permasalahan tersebut, Penulis melakukan pembahasan yang diantaranya mencakup mengenai ketentuan klausula penyesuaian ujarah menurut hukum perikatan Islam, penerapan klausula penyesuaian ujarah pada akad IMBT Bank XYZ Syari'ah, dan kesesuaian penerapan klausula penyesuaian ujarah pada akad IMBT Bank XYZ Syari'ah menurut hukum perikatan Islam. Penulis melakukan analisis penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini dilakukan analisis mengenai penerapan ketentuan klausula penyesuaian ujarah dalam proses pembuatan akad Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik dengan mengacu pada akad dari Bank XYZ Syari'ah. Secara singkat, Bank XYZ Syari'ah telah menerapkan suatu formula dalam pembayaran ujarah yang akan dilakukan oleh nasabah, namun formula ujarah tersebut diberitahukan kepada nasabah melalui metode negative confirmation. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya kata sepakat menurut pendapat dari teori dan praktisi hukum antara Bank XYZ Syari'ah dengan nasabah. Dengan demikian, diharapkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan akad IMBT, baik dari segi aturan maupun pelaksanaan, harus lebih teliti dan mengedepankan aspek kepatuhan syari'ah dengan baik.

ABSTRACT

Sharia compliance in the implementation of sharia banking system in Indonesia is still likely to be ignored, especially in the implementation of IMBT contract. In the contract, there is an amount of ujarah rent that has to be paid by the customer within a certain period and those amounts have been agreed by each party. However, if the bank wants to change the price of ujarah, then the bank must contain an ujarah adjustment clause in IMBT contract and known by customers. It is often a problem in practice. Notification of ujarah payment often taken for granted by banks to customers. Even the bank notifying ujarah payment without unilateral consideration. So, there is no such thing as ijab qabul between the parties. For those matters, the core that contained in this writing include an ujarah adjustment clause in IMBT contract according to Islamic Law, the application of ujarah adjustment clause in IMBT contract on Bank XYZ Sharia, and the suitability of the application of ujarah adjustment clause in IMBT contract of Bank XYZ Sharia according to Islamic Law.

The author conducted research analysis based on case study approach. In this study, there will be an analysis of the application provisions of ujah adjustment clause in the manufacturing process of Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik with reference to the contract from Bank XYZ Sharia. Briefly, Bank XYZ Sharia has adopted a certain formula in ujah payments to be paid by the customer, but the formula of ujah billed to the customer through negative confirmation methods. This causes the non fulfillment of unanimous according to the theory and practitioner rsquo s opinion between Bank XYZ Sharia and customers. Thus, it is expected for the parties to involved in the preparation of IMBT contract, both in terms of rules and implementation, must be thorough and advanced aspects of sharia compliance.